

**DARI PROTES MENUJU KEKACAUAN: SOSIOLOGI VISUAL DAN
KRIMINOLOGI VISUAL PEMBAKARAN DPRD
MAKASSAR DALAM LIPUTAN KOMPAS**

Hadisaputra¹, Sri Wahyuni², Rahmadani Islawiyah³,
Risqa Ayu Ramadani⁴, Ilham Darmawan⁵

¹²³⁴⁵Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammadiyah Makassar

¹hadisaputra@unismuh.ac.id, ²sriwahyuni15082003@gmail.com

ABSTRACT

Political protests increasingly occur in hybrid arenas where street interactions and media visibility combine to produce collective meaning. This study examines how Kompas's visual coverage of the 2025 burning of the Makassar Regional People's Representative Council (DPRD) building constructed spontaneous collective behavior and protest escalation. Using an interpretive qualitative design and an exploratory critical case study, the research treats photographs and videos as primary sociological evidence and analyzes them through a visual analytic framework grounded in visual sociology and visual criminology. The findings demonstrate that Kompas organized the protests into a linear escalation narrative from civil expression to chaos, prioritizing images of fire, smoke, and damaged architecture as signifiers. Early-phase visuals emphasize confrontation and synchronous crowd movement, shaping expectations of impending conflict, while later-phase images concentrate on symbolic destruction and the anonymity of the crowd, producing a collective blame effect that obscures individual responsibility. Post-escalation visuals highlight law enforcement, spatial control, and the restoration of order, legitimizing state authority through visual closure. At various stages, affective language amplified the fear and urgency while marginalizing the injustices felt by the protesters, thus translating political opposition into a securitized narrative of chaos. This study contributes to the study of protest and media by demonstrating that visibility is a constituent element of escalation dynamics and moral categorization, not simply a record of events. It also highlights the policy significance of critical visual literacy for evidence-based and humane protest governance in digital democracy.

Keywords: *Visual-analytic protest, spontaneous collective behavior, visual criminology, protest escalation, media framing, collective influence, burning of the Makassar Regional People's Representative Council (DPRD)*

ABSTRAK

Protes politik semakin sering terjadi di arena hibrida di mana interaksi jalanan dan visibilitas media bersama-sama menghasilkan makna kolektif. Studi ini meneliti bagaimana liputan visual Kompas tentang pembakaran gedung DPRD Makassar tahun 2025 membangun perilaku kolektif spontan dan eskalasi protes. Menggunakan desain kualitatif interpretatif dan studi kasus kritis eksploratif, penelitian ini memperlakukan foto dan video sebagai bukti sosiologis utama dan menganalisisnya melalui kerangka analitik visual yang berlandaskan sosiologi visual dan kriminologi visual. Temuan menunjukkan bahwa Kompas mengorganisir protes ke dalam narasi eskalasi linier dari ekspresi sipil hingga kekacauan dengan memprioritaskan citra api, asap, dan arsitektur yang rusak sebagai penanda. Visual fase awal menekankan konfrontasi dan pergerakan massa yang sinkron, membentuk ekspektasi konflik yang akan datang, sementara citra fase eskalasi berkonsentrasi pada penghancuran simbolis dan anonimitas massa, menghasilkan efek menyalahkan kolektif yang mengaburkan tanggung jawab individu. Visual pasca-eskalasi menyoroti penegakan hukum, kontrol spasial, dan pemulihan ketertiban, melegitimasi otoritas negara melalui penutupan visual. Di berbagai fase, bahasa afektif memperkuat rasa takut dan urgensi sekaligus meminggirkan ketidakadilan yang dirasakan para pengunjung rasa, sehingga menerjemahkan pertentangan politik menjadi narasi kekacauan yang disekuritisasi. Studi ini berkontribusi pada kajian protes dan media dengan menunjukkan bahwa visualitas merupakan unsur pembentuk dinamika eskalasi dan kategorisasi moral, bukan sekadar catatan peristiwa. Studi ini juga menyoroti signifikansi kebijakan dari literasi visual kritis untuk tata kelola protes yang berbasis bukti dan manusiawi dalam demokrasi digital.

Kata kunci: *Protes visual-analitik, perilaku kolektif spontan, kriminologi visual, eskalasi protes, pembungkaman media, pengaruh kolektif, pembakaran DPRD Makassar*

A. Pendahuluan

Demonstrasi politik merupakan bentuk ekspresi yang lazim dalam demokrasi modern. Demonstrasi tidak hanya berfungsi sebagai saluran bagi warga untuk mengartikulasikan tuntutan, tetapi juga sebagai arena interaksi sosial yang padat di mana emosi, identitas kolektif, dan

ketidakadilan yang dirasakan dinegosiasikan secara langsung. Lima tahun terakhir, penelitian global telah melaporkan intensifikasi protes politik baik di negara-negara demokrasi yang sedang berkembang maupun negara-negara demokrasi yang mapan, yang didorong oleh terkikisnya kepercayaan publik, meningkatnya

ketidaksetaraan, dan percepatan penyebaran informasi melalui media digital yang memungkinkan mobilisasi yang cepat dan tidak terkoordinasi dengan baik (Drury et al., 2020). Perkembangan ini menunjukkan bahwa protes semakin dibentuk oleh pertemuan situasional antara tubuh, simbol, dan otoritas, bukan hanya oleh infrastruktur organisasi yang stabil. Lingkungan langsung di jalanan, kemampuan *Platform*, dan tempo berita terkini bersama-sama menghasilkan protes sebagai sebuah peristiwa yang dapat dengan cepat berkembang, terfragmentasi, dan membentuk kembali dirinya sendiri.

Transformasi paralel lainnya menyangkut gaya dan lintasan aksi protes. Demonstrasi kontemporer sering bergeser dari aksi kolektif yang terorganisir secara formal ke perilaku kolektif yang lebih spontan dan muncul secara tiba-tiba, yang didorong oleh interaksi horizontal antar individu di ruang publik dan digital. Kajian tentang konseptualisasi protes menunjukkan bahwa respons awal massa dapat dicirikan oleh kemarahan, penularan afektif, dan koordinasi improvisasi daripada strategi yang direncanakan sebelumnya (Kudesia, 2021). Protes

dapat menjadi terlihat dan berdampak melalui narasi budaya bersama dan keluhan yang meluas, bahkan tanpa struktur komando hierarkis (Wright et al., 2022). Perspektif yang lebih baru juga memperlakukan kerumunan protes sebagai tempat kognisi terdistribusi, di mana interaksi sosial dan sumber daya material di lingkungan membentuk perilaku kolektif dan memungkinkan mobilisasi cepat (Wagoner et al., 2023). Wawasan ini mengundang pembaca demonstrasi sebagai formasi sosial dinamis yang terus-menerus menegosiasikan makna dan arah seiring perkembangan situasi.

Namun, spontanitas tidak selalu berarti keacakan, dan eskalasi jarang dapat direduksi menjadi “irasionalitas massa”. Pendekatan psikologi sosial kontemporer, khususnya Model Identitas Sosial Aksi Kolektif (SIMCA), mengusulkan bahwa partisipasi berakar pada identifikasi kelompok, ketidakadilan struktural yang dirasakan, dan keyakinan tentang efikasi kolektif dan dampak politik. Pada saat yang sama, lintasan protes dapat bergeser secara signifikan ketika medan dipenuhi oleh simbol-simbol konflik, tekanan paksaan, provokasi situasional, dan

ketidakpastian tujuan aksi. Penelitian tentang "pergeseran kekerasan" menekankan bahwa dinamika antar kelompok dan persepsi ancaman kolektif dapat mendorong transisi dari aksi damai ke bentrokan (Ng & Platow, 2024). Kehadiran polisi dan pengawasan yang ketat tidak hanya dapat mendisiplinkan protes tetapi juga dapat meningkatkan ketegangan dengan menghasilkan respons defensif dan kecurigaan timbal balik (Storbeck et al., 2025). Sosial ekonomi yang terpinggirkan, keluhan yang saling terkait dan pengabaian yang dirasakan dapat mengubah frustrasi kolektif menjadi ledakan kekerasan ketika masyarakat mengalami keterbatasan saluran untuk bersuara (Beukes & Beukes, 2023).

Demonstrasi di Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai transformasi sosial dan kontrol demokratis atas kekuasaan negara. Sejak era Reformasi, gerakan mahasiswa dan mobilisasi masyarakat sipil tetap menjadi bagian integral dari repertoar demokrasi. Meskipun demikian, studi nasional menunjukkan kecenderungan eskalasi dalam beberapa tahun terakhir, di mana beberapa tindakan

berkembang menjadi kerusuhan atau perilaku anarkis, seringkali dipicu oleh akumulasi kekecewaan politik, komunikasi yang lemah antara penguasa dan warga negara, dan volatilitas emosi kolektif di lapangan. gedung DPRD Makassar pada tahun 2025 menghadirkan kasus lokal konkret tentang eskalasi spontan menjadi penghancuran simbolis. Tindakan tersebut bukan hanya contoh kriminalitas; tetapi juga ekspresi ketidakpuasan yang terakumulasi yang diartikulasikan melalui pertunjukan kolektif yang dramatis. Api, gedung legislatif, pasukan keamanan, dan kerumunan padat membentuk lanskap visual yang sarat dengan makna politik dan emosional yang membutuhkan interpretasi sosiologis yang cermat.

Sebagian besar kajian tentang kekacauan terkait protes, khususnya dalam wacana kebijakan dan hukum, menyoroti kekhawatiran normatif legalitas, pelanggaran, tanggung jawab, dan konteks politik yang memotivasi pertentangan. Meskipun pendekatan tersebut penting, seringkali pendekatan tersebut tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana dinamika lapangan, terutama interaksi yang dimediasi secara visual antar

aktor, berkontribusi pada pembentukan perilaku kolektif spontan. Dimensi visual gerakan, simbol, kepadatan, transformasi spasial, dan urutan peristiwa membentuk persepsi dan tindakan dalam pengaturan demonstrasi (Bahrudin & Bakar, 2022). Selain itu, teknologi digital dan media sosial telah mengubah cara protes disaksikan dan dipahami. Kemampuan yang luas untuk merekam dan menyebarkan gambar dan video secara real-time menantang penjaga gerbang tradisional dan memungkinkan peristiwa untuk beredar secara global tanpa hanya bergantung pada media arus utama (Adam Troian dkk., 2021). Sehingga visual tersebut tidak hanya menjadi bukti tetapi juga katalis, memperkuat resonansi emosional dan menandakan keluhan bersama.

Studi tentang komunikasi protes digital lebih lanjut menunjukkan bahwa sirkulasi visual terkait erat dengan dinamika mobilisasi. Keterlibatan daring dan perilaku pencarian dapat mengindikasikan potensi aksi kolektif, menunjukkan bahwa perhatian publik dan bahasa bersama dapat menyatu di sekitar momen protes (Neumayer et al., 2023). Penyelenggara dan peserta

pada saat yang sama, dapat secara strategis menggunakan konten visual untuk memperluas jangkauan dan memperkuat dampak, menghasilkan narasi yang mudah dipahami yang menumbuhkan empati, solidaritas, dan identifikasi (Pamungkas et al., 2025). Video viral dapat memicu protes massal dengan mengaktifkan sentimen publik sebagai respons terhadap ketidakadilan yang dirasakan, menggambarkan hubungan antara mediasi visual dan keterlibatan warga (Singleton et al., 2024). Namun, pentingnya konstruksi legitimasi, penyimpangan dan kekacauan juga dibentuk oleh apa yang ditonjolkan atau dihilangkan oleh visual. *Platform* digital dapat mengkonsolidasikan makna spesifik legitimasi dan keresahan saat gerakan menggunakan narasi visual untuk menegaskan identitas politik dan memobilisasi dukungan (Zafar & Blackmer, 2025).

Variasi pembingkai di berbagai konteks semakin memperumit interpretasi. Banyak negara di Global South, terkait kekerasan dan protes dapat dinarasikan sebagai respons terhadap penindasan sistemik dan ketidaksetaraan sosial ekonomi,

sedangkan di tempat lain kekerasan lebih mudah dibingkai sebagai penyimpangan yang terlepas dari keluhan mendasar (Nussio, 2023). *Platform* media sosial, liputan visual dapat secara bersamaan menumbuhkan solidaritas dan mereproduksi hierarki kekuasaan, mengungkapkan ambivalensi politik visual dalam momen-momen kontroversial (Chang et al., 2022). Terlepas dari kemajuan tersebut, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam analisis visual eskalasi protes di Asia Tenggara dan Indonesia. Sebagian besar penelitian yang ada lebih mengutamakan analisis tekstual dan kurang mewakili bagaimana media lokal dan praktik visual akar rumput membentuk narasi eskalasi dan sikap publik (Dighe, 2023). Akibatnya, pemahaman sistematis tentang bagaimana perilaku kolektif spontan terbentuk, berkembang dan mencapai ambang batas eskalasi melalui analisis visual yang komprehensif masih terbatas, terutama dalam kasus-kasus destruktif yang membawa bobot simbolis yang kuat.

Menanggapi kesenjangan ini, penelitian saat ini mengkaji kasus pembakaran gedung DPRD Makassar

tahun 2025 melalui pendekatan visual-analitik yang memperlakukan visualitas sebagai variabel konstitutif dalam perilaku kolektif dan pembentukan makna publik. Membangun wawasan kontemporer tentang pembentukan protes spontan (Kudesia, 2021; Wagoner et al., 2023; Wright et al., 2022) dan dinamika eskalasi di bawah ancaman antar kelompok dan tekanan polisi (Beukes & Beukes, 2023; Ng & Platow, 2024; Storbeck et al., 2025) penelitian tersebut berfokus pada bagaimana visual media membentuk interpretasi legitimasi, kriminalitas, dan kekacauan dalam episode protes yang bergerak cepat (Adam-Troian et al., 2021; Pamungkas et al., 2025; Zafar & Blackmer, 2025). Tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan bagaimana perilaku kolektif spontan tidak hanya terjadi di lapangan tetapi juga dibangun secara diskursif melalui pemilihan dan pemingkiaan gambar dan video, sehingga membentuk tatanan moral protes dalam lingkungan media pasca-kebenaran. Cakupan penelitian sengaja dibatasi pada kasus Makassar sebagai lokasi lokal yang kritis untuk mengkaji eskalasi protes melalui bukti visual, serta untuk berkontribusi pada

perdebatan akademis dan tata kelola aksi massa yang berbasis bukti dan lebih manusiawi dalam masyarakat demokratis.

B. Metode

Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif interpretatif dengan desain studi kasus eksploratif untuk meneliti secara mendalam dinamika munculnya dan meningkatnya perilaku kolektif spontan selama protes politik. Pilihan metodologis ini berlandaskan pada asumsi bahwa eskalasi protes adalah proses kontekstual, situasional, dan sarat makna yang tidak dapat direduksi menjadi hubungan sebab-akibat linier tanpa kehilangan tekstur simbolik, afektif, dan relasional yang membentuk peristiwa tersebut. Desain studi kasus sangat tepat ketika peneliti berupaya memahami fenomena sosial yang kompleks dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan lingkungannya tidak jelas. Oleh karena itu, pembakaran gedung DPRD Makassar pada tahun 2025 diposisikan sebagai kasus kritis yang menerangi pola yang lebih luas dari dinamika protes eskalasi dalam demokrasi Indonesia kontemporer.

Orientasi metodologis ini konsisten dengan klaim utama studi ini bahwa visualitas bukanlah elemen tambahan dari protes, tetapi dimensi integral di mana perilaku kolektif dilakukan, disebarluaskan, dan diinterpretasikan secara publik.

Secara epistemologis, penelitian ini berlandaskan pada sosiologi visual dan kriminologi visual, yang keduanya memperlakukan gambar dan video bukan sebagai cermin transparan realitas, tetapi sebagai artefak yang diproduksi secara sosial yang secara bersamaan merekam dan membentuk makna, emosi, dan hubungan kekuasaan. Sosiologi visual menyediakan lensa untuk membaca kehidupan sosial gambar, termasuk bagaimana gambar tersebut membingkai interaksi, memposisikan subjek, dan menanamkan interpretasi tertentu tentang peristiwa dalam kesadaran publik. Secara paralel, kriminologi visual mengarahkan perhatian pada bagaimana narasi visual mengatur kategori penyimpangan, kekacauan, dan kontrol, dan bagaimana kategori tersebut dinormalisasi melalui sirkulasi berulang dan penerimaan institusional (Brown & Carrabine, 2020). Sikap ini mengharuskan

peneliti untuk mendekati data visual sebagai representasi yang diperdebatkan yang tertanam dalam rezim visibilitas dan invisibilitas, di mana apa yang ditampilkan, dari sudut mana, dan di bawah kerangka naratif apa yang penting secara sosiologis sama pentingnya dengan apa yang “sebenarnya terjadi”. Studi tersebut memperlakukan bidang visual protes sebagai tempat di mana legitimasi dan kriminalitas dinegosiasikan, bukan sebagai arsip netral.

Kasus pembakaran gedung DPRD Makassar dipilih karena kasus ini memusatkan beberapa fitur analitis yang penting untuk menteorikan eskalasi spontan: konfigurasi kerumunan yang berubah dengan cepat, interaksi intens antara demonstran dan pasukan keamanan, munculnya kekerasan simbolis terhadap lembaga negara, dan produksi jejak visual yang padat di media arus utama dan media sosial. Peristiwa ini menyediakan latar di mana pembentukan norma-norma yang muncul dapat ditelusuri melalui rangkaian interaksi, dan di mana saling ketergantungan dinamika jalanan dan sirkulasi yang dimediasi menjadi terlihat. Dengan berfokus

pada satu kasus, studi ini tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi secara statistik; sebaliknya, studi ini berupaya melakukan generalisasi analitis dengan mengklarifikasi mekanisme di mana perilaku kolektif spontan dapat muncul dan meningkat dalam kondisi ketidakadilan yang dirasakan dan otoritas yang diperebutkan (Yin, 2018). Analisis ini selanjutnya didasarkan pada penjelasan psikologi sosial kontemporer tentang tindakan kolektif, khususnya Model Identitas Sosial Tindakan Kolektif (SIMCA), yang menekankan identifikasi kelompok, ketidakadilan yang dirasakan, dan efikasi kolektif sebagai jangkar motivasi partisipasi, termasuk dalam tindakan non-normatif. SIMCA tidak digunakan untuk “menjelaskan” kekerasan sebagai defisit psikologis, tetapi untuk menempatkan eskalasi dalam dinamika identitas yang berubah dan ancaman antar kelompok yang dirasakan.

Data primer dalam penelitian ini terdiri dari foto, video, rekaman langsung, dan konten visual digital yang mendokumentasikan protes di tiga fase temporal: pra-eskalasi, eskalasi, dan pasca-eskalasi. Materi visual diperlakukan sebagai data

primer karena dapat mewakili interaksi, pengaruh kolektif, dan kekerasan simbolik secara bersamaan, memungkinkan peneliti untuk mengamati bagaimana tubuh, objek, dan ruang dikonfigurasi pada saat-saat pertentangan (Bayramoğlu, 2022). Korpus dikumpulkan dari dokumentasi media massa nasional, termasuk liputan visual oleh media yang mapan, serta unggahan media sosial, rekaman jurnalis warga, dan arsip visual digital yang menangkap momen-momen penting sebelum, selama, dan setelah insiden pembakaran. Strategi multisumber ini menanggapi ekologi media hibrida dari protes kontemporer, di mana pelaporan arus utama dan visual yang dihasilkan peserta berinteraksi untuk membentuk makna publik. Di era digital, kemampuan peserta dan pengamat untuk merekam dan menyebarkan visual secara real-time memperluas visibilitas peristiwa dan memampatkan waktu antara aksi dan interpretasi, sehingga memengaruhi partisipasi dan persepsi publik (Adam-Troian et al., 2021). Karena gambar dan video juga dapat digunakan secara strategis untuk memperluas jangkauan dan memperkuat resonansi emosional, dataset ini dipahami

sebagai bagian dari bidang praktik protes yang dimediasi secara lebih luas daripada sebagai catatan pasif (Pamungkas et al., 2025). Pemilihan data mengikuti prinsip-prinsip bertujuan yang dipandu oleh relevansi analitik. Item visual disertakan ketika secara jelas menggambarkan interaksi antara demonstran dan pasukan keamanan, konfigurasi kolektif kerumunan, momen eskalasi atau deeskalasi, dan munculnya objek simbolis yang terkait dengan kekerasan dan perlawanan seperti api, asap, barikade, spanduk, atau gedung legislatif itu sendiri. Strategi bertujuan ini dirancang untuk menonjolkan jejak visual di mana perilaku kolektif spontan menjadi teramati: tidak hanya dalam tindakan penghancuran yang terang-terangan, tetapi juga dalam momen transisi di mana ketegangan terakumulasi, emosi beredar, dan arah kolektif menjadi ambigu. Selain itu, jika tersedia, keterangan, cap waktu, dan konteks *Platform* yang menyertainya dipertahankan sebagai metadata kontekstual, memungkinkan peneliti untuk menempatkan materi visual dalam ritme temporal peristiwa dan dalam lingkungan naratif yang memengaruhi interpretasi.

Prosedur analitis berlangsung melalui alur kerja interpretatif bertahap yang mengintegrasikan pembacaan kontekstual, analisis produksi dan peminjaman, interpretasi kriminologis, dan pembacaan afektif yang terwujud, diikuti oleh sintesis yang diinformasikan oleh teori-teori kontemporer tentang perilaku kolektif. Tahap pertama melibatkan identifikasi identitas dasar visual dan konteks situasionalnya, termasuk jenis visual, sumber produksi, posisi kamera, jarak peminjaman, dan pengaturan interaksi langsung dalam fase pra-eskalasi, eskalasi, atau pasca-eskalasi. Tahap ini diperlukan untuk mencegah pembacaan ahistoris yang memisahkan gambar dari hubungan spasial-temporal dan posisi sosial di mana gambar tersebut diproduksi. Interpretasi visual diperlakukan sebagai praktik kontekstual, yang membutuhkan perhatian pada keadaan dan niat yang tertanam dalam tindakan perekaman (Pink, 2021). Tahap ini mengambil inspirasi dari etnografi visual, yang menekankan pendalaman dalam konteks sosial materi visual untuk menafsirkan bagaimana gambar menyampaikan makna dan emosi politik (Proust & Saldaña, 2022).

Tahap kedua mengkaji produksi dan peminjaman visual dengan menanyakan bagaimana dan mengapa gambar-gambar tertentu diproduksi, apa yang disoroti atau disembunyikan, dan bagaimana pilihan komposisinya mengundang interpretasi spesifik tentang legitimasi atau kekacauan protes. Tahap ini didasarkan pada penelitian tentang komunikasi visual dan peminjaman protes, yang menunjukkan bahwa kombinasi citra dan isyarat naratif dapat membentuk legitimasi atau delegitimasi publik terhadap protes melalui “bingkai protes” yang berulang (Hoffmann & Neumayer, 2024). Berdasarkan ekologi media hibrida, peminjaman tidak dimonopoli oleh jurnalisme profesional; sebaliknya, visual media arus utama dan media sosial dapat memperkuat narasi tertentu, seringkali menekankan konfrontasi dan penyimpangan dengan cara yang memengaruhi keterlibatan audiens dan interpretasi politik (García-Perdomo et al., 2023). Oleh karena itu, analisis mempertimbangkan bagaimana momen yang sama dapat dibingkai secara berbeda di berbagai sumber dan bagaimana audiens berinteraksi dengan narasi visual ini untuk

merekonstruksi makna perjuangan dan ketertiban (Harlow & Brown, 2021).

Tahap ketiga menganalisis representasi penyimpangan, kriminalitas, dan kontrol melalui kerangka kriminologi visual. Di sini, studi ini meneliti bagaimana pembakaran, kekerasan, dan aktor protes dikonstruksi secara visual sebagai ancaman, penjahat, atau penentang simbolis, dan bagaimana kategori seperti “perusuh” atau “ancaman keamanan” dapat diproduksi dan dilegitimasi melalui motif visual yang berulang dan narasi tekstual yang menyertainya (Brown & Carrabine, 2020). Tujuannya bukan untuk menetapkan kesalahan hukum, tetapi untuk memahami bagaimana bidang visual berpartisipasi dalam produksi sosial klasifikasi moral. Karya interpretatif ini selaras dengan pendekatan kualitatif dalam kriminologi visual yang secara sistematis mengkategorikan dan menafsirkan konten visual untuk menelusuri bagaimana representasi mengkonsolidasikan narasi bahaya dan keamanan dalam wacana publik (Porter, 2025). Hal tersebut tetap memperhatikan konteks budaya dan lokal di mana representasi tersebut

diciptakan dan dikonsumsi, penekanan yang sering diperkuat melalui kepekaan etnografi dalam penelitian kriminologi (Silva & Santos, 2024). Melalui keterlibatan etnografi visual dengan beragam bentuk visual (Wikström & Kroneberg, 2022).

Tahap keempat berfokus pada tubuh, emosi, dan pengaruh kolektif sebagaimana tampak secara visual, termasuk ekspresi wajah, gerak tubuh, sinkronisasi gerakan, munculnya ritme kerumunan, dan penampilan aksi ekstrem di hadapan kamera. Tahap ini dipengaruhi oleh perspektif pengaruh dan perwujudan yang menekankan emosi seperti kemarahan, euforia, dan ketakutan sebagai emosi yang diproduksi dan ditransmisikan secara kolektif dalam kerumunan, bukan hanya dialami secara pribadi oleh individu (Drury et al., 2020). Data visual dibaca sebagai infrastruktur afektif yang memungkinkan emosi menjadi terbagi secara sosial dan berdampak politis, terutama ketika gambar beredar dengan cepat dan berulang kali. Karena kamera dapat mengubah perilaku aktor dan mengintensifkan performativitas, analisis ini juga memperlakukan teknologi perekaman dan audiens yang dibayangkan

sebagai bagian dari medan situasional. Studi ini mengacu pada temuan analitik visual bahwa kehadiran kamera dan sirkulasi langsung dapat membentuk perilaku, mempercepat difusi emosi, dan berkontribusi pada dinamika eskalasi (Chen et al., 2022; Jiang & Chen, 2020). Tahap kelima mensintesis bacaan-bacaan di atas untuk menafsirkan perilaku kolektif spontan, dengan fokus pada bagaimana tindakan-tindakan spesifik ditiru, dinormalisasi, dan dilegitimasi tanpa perintah formal, dan bagaimana eskalasi dapat berkembang sebagai spiral interaksi. Sintesis interpretatif ini dipandu oleh indikator spontanitas, penalaran visual, fragmentasi massa, dan pergeseran norma-norma yang muncul, yang dibaca berdasarkan jangkak motivasi yang disoroti oleh SIMCA, yaitu keselarasan identitas, ketidakadilan yang dirasakan, dan efikasi kolektif. Sintesis ini juga memperhatikan dinamika antar kelompok di bawah ancaman, dengan menyadari bahwa eskalasi dapat mencerminkan konflik yang dirasakan antara pengunjung rasa dan pihak berwenang, di mana visibilitas kepolisian dan pengawasan dapat menjadi bagian dari perhitungan

emosional dan strategis di lapangan (Ng & Platow, 2024; Storbeck et al., 2025) Dengan menggabungkan penjelasan motivasi dan bacaan situasional, penelitian ini bertujuan untuk menghindari reduksionisme psikologis dan penjelasan yang murni tekstual.

Dinamika kerumunan yang terjadi secara eksplisit mengkaji relasi kekuasaan dan kontrol sosial sebagaimana tampak secara visual: dominasi ruang oleh pasukan keamanan, penggunaan simbol negara, strategi penahanan, dan praktik visual tandingan para pengunjung rasa seperti menampilkan spanduk, merekam pihak berwenang, atau melakukan aksi simbolis. Visualitas diperlakukan sebagai arena negosiasi kekuasaan di mana legitimasi negara dan perlawanan rakyat diperebutkan melalui tanda dan pertunjukan (Brown & Carrabine, 2020) Untuk menafsirkan simbolisme dan makna sosial, studi ini menggunakan kepekaan semiotik dalam membaca objek-objek seperti gedung DPRD, api, bendera, poster, dan kamera sebagai tanda yang menghasilkan makna politik. Pembakaran gedung legislatif ditafsirkan tidak hanya sebagai

penghancuran material tetapi juga sebagai tindakan simbolis yang dapat dibaca sebagai delegitimasi suatu institusi dan sebagai artikulasi kemarahan kolektif yang terwujud, terutama ketika citra tersebut berulang kali diedarkan sebagai ikon yang menentukan peristiwa tersebut (Bayramoğlu, 2022).

Studi ini juga membahas sirkulasi dan konsumsi visual digital sebagai bagian dari protes yang dimediasi dan apa yang oleh beberapa penelitian disebut sebagai dinamika kejahatan yang dimediasi, di mana viralitas, siaran langsung, dan audiens imajiner dapat membentuk baik performa maupun interpretasi kekerasan. Dimensi ini penting secara metodologis karena gambar tidak berakhir dengan peristiwa tersebut; gambar tersebut menyebar, diberi keterangan ulang, dan dikontekstualisasikan kembali, sehingga menghasilkan arena kontestasi tingkat kedua atas legitimasi dan kekacauan. Penelitian menunjukkan bahwa penyebaran visual yang strategis dan viral dapat memobilisasi sentimen dan mengintensifkan partisipasi, menunjukkan bahwa sirkulasi itu sendiri adalah mekanisme yang dapat

memengaruhi lintasan protes (Neumayer et al., 2023; Singleton et al., 2024). Karena alasan itu, analisis ini mempertimbangkan tidak hanya apa yang ditunjukkan oleh gambar, tetapi juga bagaimana dan ke mana gambar tersebut bergerak, dan komunitas interpretatif mana yang dimasukinya.

Untuk memperkuat penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi metodologis dengan membandingkan materi visual dengan sumber dokumenter dan, jika tersedia, catatan wawancara, sehingga memeriksa silang interpretasi dan menempatkan visual dalam pengetahuan kontekstual yang lebih luas. Triangulasi diperlakukan bukan sebagai validasi mekanis, tetapi sebagai sarana untuk menyempurnakan interpretasi dengan membandingkan gambar dengan catatan alternatif dari peristiwa yang sama. Refleksivitas merupakan bagian integral dari desain karena interpretasi visual dibentuk oleh posisi sosial peneliti, respons afektif, dan komitmen analitik. Mengikuti panduan metodologis dalam penelitian visual, kesadaran reflektif dipertahankan sepanjang tahapan analitik untuk mengidentifikasi potensi bias, untuk membuat langkah interpretatif

transparan, dan untuk tetap memperhatikan apa yang mungkin disembunyikan maupun diungkapkan oleh gambar (Pink, 2021). Melalui kombinasi logika studi kasus, epistemologi analitik visual, dan analisis interpretatif bertahap ini, metode ini dirancang untuk menjelaskan bagaimana perilaku kolektif spontan dan makna publiknya dibentuk di persimpangan interaksi jalanan dan sirkulasi visual yang dimediasi.

C. Hasil

3.1. Karakteristik Perilaku Kolektif Spontan dalam Narasi Media Kompas

Analisis visual terhadap pemberitaan Kompas menunjukkan arsitektur naratif yang konsisten di mana demonstrasi Makassar 2025 digambarkan sebagai sebuah episode yang secara "alami" bergeser dari ekspresi politik menuju kekacauan. Seluruh korpus, protes tersebut awalnya diposisikan sebagai saluran demokrasi yang familiar, arena suara kolektif, namun secara bertahap ditulis ulang sebagai peristiwa kerumunan yang tidak terkendali yang berujung pada kehancuran. Yang secara sosiologis menentukan dalam

konstruksi ini bukanlah hanya penekanan pada adegan akhir kerusakan, tetapi juga linearitas yang tampaknya digunakan Kompas untuk menghubungkan pertemuan publik dengan kekacauan, seolah-olah kehadiran massa besar mengandung kecenderungan inheren untuk melarutkan batasan normatif. Narasi linier ini memiliki efek ganda: menyederhanakan perkembangan peristiwa menjadi lintasan yang dapat diprediksi dan, pada saat yang sama, melemahkan visibilitas analitis dari mekanisme sosial di mana perilaku kolektif muncul di tempat kejadian.

Kompas secara implisit mengakui tidak adanya struktur organisasi yang stabil di balik protes tersebut. Pelaporan berulang kali mengandalkan deskripsi umum seperti "kerumunan," "massa," "demonstran" tanpa secara sistematis mengidentifikasi organisasi penggerak, kepemimpinan, atau infrastruktur strategis yang umumnya disorot dalam catatan gerakan sosial klasik. Pola leksikal ini bukanlah hal sepele; ia melakukan gestur klasifikasi yang menempatkan protes lebih dekat pada perilaku kolektif spontan daripada tindakan kolektif terorganisir, menggemakan kajian kontemporer

yang memikirkan kembali protes sebagai sesuatu yang muncul dan situasional daripada terkoordinasi secara terpusat (Kudesia, 2021; Wagoner et al., 2023; Wright et al., 2022). Namun narasi tersebut tidak menguraikan implikasi dari ketidakhadiran ini. Spontanitas, seperti yang digambarkan, lebih sering disamakan dengan kurangnya kendali daripada dengan adaptasi kolektif, kognisi terdistribusi, atau koordinasi yang muncul. Akibatnya, publik diajak untuk membaca spontanitas terutama sebagai kekurangan jalan pintas penjelasan bukan sebagai mode tindakan kolektif yang dapat dipahami secara sosiologis.

Urutan visual merupakan inti dari ekonomi interpretatif ini. Gambar dan video Kompas menunjukkan bahwa bentuk sosial kerumunan tidak statis; ia berubah seiring waktu dan ruang. Bingkai awal menggambarkan pertemuan publik di mana tubuh-tubuh mengarah ke gedung dan ke arah otoritas, dengan kehadiran polisi yang terlihat menandakan penahanan awal protes. Pada bingkai selanjutnya, kerumunan menjadi kurang terdiferensiasi, lebih padat secara kinetik, dan semakin terorganisir di

sekitar api magnet visual yang kuat. Masalahnya adalah Kompas cenderung menonjolkan intensitas visual akhir sambil meredam transisi. Berdasarkan perspektif perilaku kolektif, tindakan destruktif jarang muncul begitu saja; tindakan tersebut biasanya melibatkan akumulasi ketegangan, rangsangan emosional, dan pendefinisian ulang norma kolektif melalui isyarat interaksional. Namun, narasi Kompas sering memperlakukan titik balik sebagai sesuatu yang tiba-tiba, yang membuat pergeseran norma yang muncul menjadi buram secara analitis dan mendorong interpretasi akal sehat tentang kekerasan massa sebagai irasionalitas.

Untuk memperjelas struktur korpus visual yang digunakan dalam penelitian ini, Tabel 1 memetakan visual Kompas utama berdasarkan tanggal, media, fokus pembingkai, dan indikasi makna sosial.

Tabel 1. Data Visual dalam Liputan Media Kompas

TI D AK	Ta ng gal	Tip e Vis ual	Deskri psi Visual	Fokus Pemb ngkaia n	Makn a Sosi al yang Ditun

					jukka n
1	29 Ag ust us 20 25	Fot o jurn alist ik	Massa dan polisi saling berhad apan di depan gedung DPRD.	Konfro ntasi awal	Kete gang an laten
2	29 Ag ust us 20 25	Vid eo beri ta	Para penont on bersor ak dan berger ak seremp ak.	Solida ritas kolekti f	Penu laran emos i
3	30 Ag ust us 20 25	Fot o jurn alist ik	Api mengh angusk an sebagi an gedung DPRD.	Pengh ancur an simbol is	Dele gitim asi instit usion al
4	30 Ag ust us 20 25	Vid eo digit al	Gas air mata dilepas kan; kerumu nan bubar.	Kontro l sosial	Domi nasi nega ra
5	31 Ag ust us	Fot o jurn	Bangu nan yang terbaka	Tatan an pasca konflik	Norm alisa si daya

	20 25	alist ik	r dijaga oleh polisi.		
--	----------	-------------	-----------------------------	--	--

Tabel 1. tidak hanya

mengklasifikasikan konten, tabel tersebut menunjukkan bagaimana setiap visual membawa fungsi analitik yang berbeda dan bagaimana, bersama-sama, visual-visual tersebut menyusun alur cerita yang meningkat. Visual tanggal 29 Agustus berfungsi sebagai prolog, mendefinisikan hubungan polisi-massa dan membangun suasana afektif. Visual tanggal 30 Agustus adalah titik tumpu, mengubah pertemuan politik menjadi adegan ancaman melalui citra api dan pengendalian. Visual tanggal 31 Agustus berfungsi sebagai epilog penutupan, di mana bangunan yang terbakar menjadi simbol kekacauan yang sudah terkendali di bawah pengawasan negara. Yang penting, tabel ini juga memperlihatkan kecenderungan dalam liputan Kompas untuk mengutamakan indeks dramatis api, asap, konfrontasi daripada interaksi sehari-hari di mana massa menegosiasikan batasan dan makna.



Gambar 1. Kerumunan Massa
Sebelum Pembakaran Gedung
DPRD Makassar.

Gambar tersebut menangkap fase awal konsentrasi massa di ruang publik sekitar gedung DPRD. Massa menghadap gedung, sementara beberapa individu mengangkat ponsel, menunjukkan dokumentasi dan partisipasi simbolis. Kehadiran polisi dengan perlengkapan standar menandakan antisipasi awal eskalasi, sementara lingkungan sekitarnya tetap utuh secara fisik, menunjukkan fase pra-konflik di mana aspirasi, pengawasan, dan kehadiran bersama hidup berdampingan dalam ruang bersama.

Gambar 1. Memvisualisasikan konfigurasi pra-eskalasi yang kemudian ditafsirkan ulang oleh Kompas sebagai pendahulu kekacauan. Kehadiran massa dan polisi dalam lingkungan yang relatif utuh menunjukkan bahwa protes awalnya beroperasi dalam kerangka

demokrasi yang dapat dikenali. Namun, ketika cerita kemudian disusun ulang di sekitar tontonan pembakaran, konfigurasi sebelumnya dibaca secara retrospektif sebagai ketenangan yang tidak stabil sebuah pertanda tersirat bukan sebagai momen sosial di mana berbagai kemungkinan arah masih ada.

Singkatnya, bagian ini menjawab pertanyaan penelitian pertama dengan menunjukkan bahwa perilaku kolektif spontan hadir dalam demonstrasi, namun narasi Kompas memadatkan spontanitas tersebut menjadi citra kekacauan yang menyimpang. Liputan media mengakui kurangnya organisasi terpusat, tetapi tidak memperlakukan dinamika interaksional yang muncul sebagai sesuatu yang bermakna secara analitis. Akibatnya, karakter sosial politik yang kompleks dari perilaku kolektif spontan yang berakar pada identitas, ketidakadilan yang dirasakan, dan isyarat situasional yang berubah-ubah direduksi menjadi alur cerita yang dimoralisasi di mana kekacauan tampak sebagai takdir yang hampir tak terhindarkan bagi kerumunan.

3.2. Faktor Visual dan Situasional dalam Eskalasi melalui Pembungkahan Media

Praktik pembungkahan Kompas menunjukkan bahwa faktor visual diposisikan sebagai penggerak utama makna dalam narasi eskalasi. Api, asap hitam, dan kerusakan fisik pada gedung DPRD berulang kali dipusatkan sebagai citra jangkar, mengarahkan pembaca untuk menafsirkan seluruh peristiwa melalui lensa kekerasan dan ancaman. Komunikasi visual, citra jangkar berfungsi sebagai poros interpretatif: citra tersebut memandu perhatian, menyusun memori, dan menyediakan kunci sederhana yang melaluinya rangkaian peristiwa yang kompleks diuraikan. Dominasi berulang api dan kerusakan tidak hanya mengintensifkan dampak; tetapi juga mengatur ulang kausalitas dengan menyiratkan bahwa eskalasi adalah kebenaran yang menentukan peristiwa tersebut.

Kerangka ini diperkuat oleh pilihan leksikal yang tidak hanya deskriptif tetapi juga sarat dengan norma. Kompas menggunakan istilah-istilah seperti "kerusuhan," "anarkis," dan "provokatif" untuk melabeli perilaku massa, yang secara simbolis

mengkriminalisasi tindakan kolektif spontan dengan mendefinisikannya kembali dari ekspresi politik menjadi pelanggaran hukum. Konsekuensi sosiologisnya adalah klaim politik dan tekanan situasional protes menjadi sekunder, muncul sebagai informasi latar belakang daripada sebagai variabel interpretatif. Pola ini menggemakan temuan yang lebih luas dalam sosiologi visual bahwa narasi media dapat memperkuat kerangka konfrontasi dan penyimpangan, membentuk keterlibatan audiens dan persepsi publik (García-Perdomo et al., 2023). Kerangka tersebut tidak hanya melaporkan eskalasi; ia mengatur eskalasi sebagai makna moral dari peristiwa tersebut.

Faktor-faktor situasional yang umumnya ditekankan dalam kajian aksi massa dan kolektif kontemporer tekanan polisi, kepadatan spasial, eskalasi emosional, dan titik-titik kritis interaksional tidak ditonjolkan sebagai komponen analitik dalam alur cerita Kompas. Ketidakhadiran ini signifikan secara analitis karena penjelasan yang berorientasi pada SIMCA menekankan bahwa aksi kolektif dibentuk oleh ketidakadilan yang dirasakan, keselarasan identitas, dan

efikasi kolektif, dan bahwa orientasi ini dapat dikonfigurasi ulang di bawah ancaman dan paksaan. Ketika tekanan situasional meningkat, batasan normatif perilaku kolektif dapat bergeser dengan cepat. Namun, Kompas cenderung menceritakan eskalasi sebagai sesuatu yang tiba-tiba, sehingga mekanisme transformasi norma kurang dijelaskan.

Namun, rekaman visual menunjukkan logika yang berbeda: intensifikasi bertahap yang melibatkan momen-momen transisi. Gambar-gambar awal menekankan konfrontasi tatap muka dan sinkronisasi, menunjukkan adanya pembentukan identitas kolektif dan keselarasan emosional. Gambar-gambar selanjutnya berfokus pada api dan pembubaran massa, menunjukkan pergeseran dalam bidang interaksi massa dan munculnya serangkaian norma jangka pendek baru yang berorientasi pada kelangsungan hidup, perlawanan, atau tontonan. Perbedaan antara rangkaian visual dan kerangka naratif menunjukkan bahwa Kompas menyederhanakan peristiwa tersebut menjadi model sebab-akibat linier, di mana massa menjadi pusat risiko yang melekat.

Penyederhanaan ini tidak hanya menghilangkan konteks eskalasi tetapi juga berkontribusi pada pemahaman publik di mana demonstrasi dianggap memiliki kecenderungan intrinsik terhadap kekacauan.

Dengan demikian, pertanyaan penelitian kedua dijawab dengan menunjukkan bahwa eskalasi dibentuk oleh konvergensi kondisi lapangan dan pemilihan media. Kondisi di lapangan dapat menghasilkan titik-titik pemicu, tetapi pembingkai media mengintensifkan dan menstabilkan interpretasi tertentu dengan mengutamakan visual dan label tertentu. Visual bukan hanya representasi dari eskalasi; ia adalah teknologi yang melaluinya eskalasi dibuat mudah dipahami sebagai fitur "esensial" dari protes.

3.3. Representasi Penyimpangan dan Konstruksi Kriminalitas

Analisis kriminologi visual terhadap korpus Kompas mengungkapkan konstruksi kriminalitas yang berpola yang beroperasi melalui tiga strategi representasional yang saling terkait: sentralisasi simbol ancaman, pengaburan pelaku individu, dan legitimasi intervensi negara. Strategi

pertama melibatkan penekanan berulang pada gambar api, asap tebal, dan arsitektur yang rusak. Unsur-unsur visual ini berfungsi sebagai simbol singkat untuk penyimpangan, menghasilkan kesan bahaya dan ketidakstabilan yang menempatkan protes di luar batas ekspresi politik yang sah. Dalam banyak konteks media, citra ancaman semacam itu menjadi indeks dominan yang digunakan audiens untuk mengkategorikan peristiwa, dan dalam kasus ini memperkuat persepsi bahwa realitas yang mendefinisikan protes adalah kekerasan.

Rangkaian visual tersebut juga menunjukkan peningkatan bertahap yang dapat ditelusuri melalui perubahan komposisi. Pada fase awal tanggal 29 Agustus 2025, foto-foto Kompas menampilkan jarak fisik yang relatif jelas antara massa dan polisi. Pembingkai horizontal dan perspektif jarak menengah menghadirkan adegan visibilitas yang seimbang: massa tampak terorganisir melalui spanduk dan simbol tuntutan, dan kehadiran polisi tampak sebagai penyeimbang daripada sebagai kekuatan yang berlebihan. Konfigurasi ini mendukung pembacaan protes sebagai sesuatu

yang diperebutkan tetapi belum runtuh menjadi kekacauan.



Gambar 2. Konfrontasi awal antara massa dan pihak berwenang di Gedung DPRD Sulawesi Selatan
Sumber: Kompas.com, 29 Agustus 2025.

Gambar tersebut memperlihatkan jarak yang terlihat antara demonstran dan pasukan keamanan pada fase awal. Pembingkai horizontal dan perspektif pengambilan gambar jarak menengah menunjukkan bidang visual yang relatif seimbang sebelum eskalasi terjadi.

Representasi dalam liputan Kompas, gerakan yang sinkron dan nyanyian bersama mengundang interpretasi keselarasan emosional, sementara penjajaran dengan kehadiran polisi menandakan kemungkinan konfrontasi di masa depan. Citra fase awal seperti itu tidak netral; citra tersebut dapat membentuk ekspektasi publik tentang apakah eskalasi akan segera terjadi

dengan memprioritaskan isyarat ketegangan daripada negosiasi rutin. Hal ini sejalan dengan temuan yang lebih luas bahwa kerangka visual awal memengaruhi bagaimana audiens menafsirkan perkembangan selanjutnya, terutama ketika citra konfrontatif ditampilkan di latar depan (Cowart et al., 2022).

Titik balik terjadi pada 30 Agustus 2025, ketika api menjadi pusat perhatian dan peristiwa tersebut secara visual berubah menjadi adegan kekerasan terbuka. Api bukan hanya fenomena fisik; ia merupakan objek semiotik yang kuat yang mengatur ulang visibilitas kerumunan. Individu-individu di sekitar api menjadi anonim, terserap ke dalam massa, dan bidang visual kehilangan diferensiasi pribadi. Transformasi ini mendukung strategi kedua konstruksi kriminalitas: pengaburan pelaku individu. Kompas jarang menyajikan identifikasi yang jelas tentang siapa yang memulai pembakaran atau terlibat dalam tindakan destruktif tertentu. Sebaliknya, narasi tersebut bergantung pada deskriptor kolektif yang melarutkan perbedaan internal dalam kerumunan. Efeknya adalah bentuk menyalahkan kolektif, di mana seluruh massa dikaitkan dengan

tindakan kriminal, sementara kompleksitas peran dan niat dalam kerumunan tetap tidak terartikulasi.



Gambar 3. Kebakaran Gedung DPRD Sulawesi Selatan. Sumber:

Kompas.com, 30 Agustus 2025.

Api mendominasi dan menandai sebuah keretakan eskalasi yang menentukan. Terbakarnya gedung legislatif berfungsi sebagai simbol kehancuran dan delegitimasi institusional, sekaligus memperkuat pembungkaman media terhadap kejahatan massal.

Strategi ketiga berkaitan dengan legitimasi tindakan pasukan keamanan. Seiring pergeseran narasi menuju kekacauan, bahasa Kompas semakin menekankan "tindakan tegas," "keamanan," dan "pemulihan," memposisikan negara sebagai aktor rasional yang menghadapi kekacauan. Visual yang menunjukkan pengerahan polisi, pembubarisan massa, dan penjagaan pasca-acara menjadi bukti kebutuhan dan kompetensi negara. Logika naratif ini

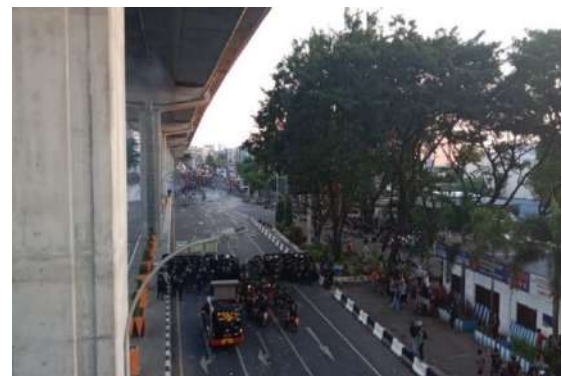
selaras dengan penelitian yang menunjukkan bahwa citra protes kekerasan dapat mempolarisasi audiens ke dalam biner moral antara 'ketertiban yang sah' dan 'massa kriminal,' sehingga memperkuat hierarki yang ada (Harlow & Brown, 2023). Pada saat yang sama, hal ini menggambarkan bagaimana citra media sering kali memperkuat kesalahan kolektif daripada tanggung jawab individu, terutama ketika kelompok besar digambarkan dalam tindakan kekerasan (James, 2024).

Melalui strategi-strategi tersebut, Kompas membangun tatanan moral yang jelas, massa diposisikan sebagai sumber kekacauan, negara sebagai penjaga stabilitas. Temuan menunjukkan bahwa kriminalitas dalam protes politik tidak hanya muncul dari aksi lapangan; tetapi juga dihasilkan melalui rezim visual dan naratif yang mengatur apa yang dianggap sebagai penyimpangan. Kejahatan menjadi, sebagian, produk dari wacana visual, bukan hanya fakta empiris.

3.4. Emosi dan Pengaruh Kolektif dalam Bahasa Media

Dimensi afektif liputan Kompas ditandai dengan kosakata yang sarat emosi yang membangun suasana

ketakutan dan urgensi. Istilah-istilah seperti "tegang," "kacau," "lumpuh," dan "darurat" berfungsi sebagai isyarat afektif yang mengarahkan pembaca bagaimana seharusnya merasakan peristiwa tersebut. Pembingkai afektif ini tidak hanya menggambarkan; tetapi juga memperkuat rasa ancaman dan mengubah protes menjadi narasi keselamatan publik. Penekanan pada ancaman sejalan dengan kecenderungan media yang lebih luas untuk mengutamakan citra kekacauan dalam liputan protes, yang dapat menggeser label dari "demonstrasi" menjadi "kerusuhan," sehingga mengubah konteks interpretatif (Zulli et al., 2022).



Gambar 4. Penggunaan Gas Air Mata dalam Pengendalian Massa.

Sumber: Kompas.com, 30 Agustus 2025.

Gambar tersebut menggambarkan adegan tegang dan mendesak yang ditandai dengan

pembubaran, asap, dan pelarian, memperkuat kerangka emosional yang menempatkan protes tersebut sebagai ancaman terhadap ketertiban dan keamanan publik.

Gambar 4. Menggambarkan bagaimana pengaruh dapat dihasilkan melalui kombinasi isyarat visual dan label naratif. Penggunaan gas air mata, pergerakan tubuh yang tersebar, dan kabut yang terlihat menciptakan kesan sensorik darurat yang mengundang rasa takut dan kecemasan. Gambar tersebut tidak hanya merekam tindakan polisi, tetapi juga membangun cakrawala emosional publik di mana kekacauan tampak jelas dengan sendirinya. Hal ini konsisten dengan penelitian yang menunjukkan bahwa gambar yang menggambarkan konflik atau penegakan hukum yang dimiliterisasi dapat meningkatkan kecemasan dan mendukung interpretasi punitif terhadap protes (James, 2024; Harlow & Brown, 2023).

Pada saat yang sama, kehidupan afektif para demonstran kemarahan, frustrasi, dan ketidakadilan yang dirasakan tidak dieksplorasi dengan kedalaman yang sebanding. Ekspresi emosional massa cenderung direduksi menjadi

agresi irasional, terlepas dari pengalaman struktural yang sering memotivasi partisipasi protes. Reduksi ini memiliki konsekuensi sosiologis karena penjelasan berbasis SIMCA menekankan bahwa ketidakadilan yang dirasakan dan keselarasan identitas merupakan hal sentral dalam motivasi tindakan kolektif. Ketika narasi media memisahkan kemarahan dari ketidakadilan dan identitas, mereka mengubah emosi politik menjadi patologi. Hasilnya adalah ketidakseimbangan afektif: ketakutan publik diutamakan, sementara empati terhadap demonstran dibatasi.

Ketidakseimbangan ini menunjukkan bagaimana media dapat mengatur emosi publik. Dengan mengutamakan narasi yang berpusat pada rasa takut, Kompas secara implisit menginstruksikan audiens untuk membaca protes melalui lensa moral keamanan daripada melalui lensa demokrasi berupa keluhan. Tata kelola afektif semacam ini berkontribusi pada delegitimasi : hal ini mempersempit ruang emosional di mana protes dapat dipahami sebagai tuntutan politik dan memperluas ruang di mana protes ditafsirkan sebagai ancaman.

3.5. Hubungan Kekuasaan, Legitimasi, dan Ketiadaan Suara Alternatif

Narasi Kompas membangun hierarki suara di mana pernyataan pejabat negara dan aparat keamanan diutamakan sebagai sumber otoritatif, sementara demonstran, kelompok masyarakat sipil, dan aktor advokasi hanya mendapat visibilitas terbatas. Asimetri ini menghasilkan hierarki wacana yang menyelaraskan negara dengan rasionalitas dan legitimasi, dan massa dengan kekacauan dan ketidakbertanggungjawaban. Secara visual, kehadiran polisi berulang kali dikaitkan dengan pengamanan dan pemulihan, sedangkan kehadiran massa dikaitkan dengan volatilitas dan risiko. Hasilnya bukan hanya ketidakseimbangan kutipan; ini adalah arsitektur moral di mana narasi resmi menjadi sumber kebenaran utama.

Representasi yang sarat kekuasaan ini memiliki dua implikasi bagi pembacaan analitik visual dari perilaku kolektif spontan. Pertama, hal itu mengurangi jangkauan interpretasi protes dengan membatasi akses ke motivasi, keluhan, dan pengalaman para demonstran. Ketika para pelaku protes tidak diizinkan untuk menceritakan alasan mereka sendiri,

protes tersebut menjadi objek yang harus dikelola daripada klaim yang harus didengar. Kedua, hal itu memperkuat biner moral yang diidentifikasi oleh kriminologi visual sebagai inti dari banyak konstruksi media tentang kekacauan: negara direpresentasikan sebagai penjaga stabilitas, massa sebagai massa menyimpang yang legitimasinya telah berakhir (Brown & Carrabine, 2020).

Tidak adanya suara alternatif juga memperbesar dinamika saling menyalahkan secara kolektif. Tanpa diferensiasi antara peserta, penonton, dan calon penghasut, kerumunan menjadi subjek yang monolitik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pembingkai media sering kali menggeneralisasi tanggung jawab di seluruh kelompok daripada mengidentifikasi pelaku tertentu, sehingga mengaburkan nuansa dan heterogenitas internal (James, 2024; Zulli dkk., 2022). Dalam beberapa konteks komparatif, studi mencatat bahwa media terkadang dapat mengindividualisasikan tindakan tertentu, namun individualisasi tersebut sering kali dibayangi oleh pembingkai kolektif yang dominan, menghasilkan pelajaran moral yang disederhanakan

tentang “kerumunan” (Elareshi et al., 2025).

Dalam kasus Makassar, dominasi narasi resmi bukan sekadar rutinitas jurnalistik; hal itu memiliki konsekuensi epistemik. Narasi tersebut menyediakan kerangka interpretatif negara sebagai standar, yang kemudian menjadi landasan pemahaman publik tentang legitimasi, kekerasan, dan respons yang tepat. Substansi politik protes tersebut meredup, digantikan oleh alur cerita yang berpusat pada keamanan. Melalui pengaturan wacana ini, Kompas berpartisipasi dalam reproduksi tatanan moral tertentu: stabilitas diprioritaskan di atas pertentangan, dan kontrol negara di atas kontestasi demokratis.

3.6. Simbolisme Terbakarnya Gedung DPRD

Dari perspektif semiotik, pembakaran gedung DPRD berfungsi sebagai tanda politik yang padat, bukan sekadar tindakan material. Gedung legislatif adalah simbol otoritas institusional, representasi, dan janji negara akan responsivitas demokratis. Ketika menjadi sasaran kebakaran, tindakan tersebut dapat dibaca sebagai pernyataan nyata tentang delegitimasi : penolakan

dramatis terhadap kredibilitas institusional dan pertunjukan publik dari kemarahan yang terakumulasi. Dalam sosiologi visual, simbolisme semacam itu penting karena memusatkan makna politik ke dalam sebuah ikon yang dapat diedarkan, ditafsirkan ulang, dan digunakan sebagai bukti klaim moral yang saling bertentangan (Bayramoğlu, 2022).

Narasi visual Kompas, menunjukkan api berfungsi sebagai objek sekaligus metafora. Ia merupakan indeks visual kehancuran dan penanda moral dari tindakan berlebihan. Kehadiran api yang menonjol mengarahkan protes dari sekadar menuntut hak menjadi pelanggaran, menjadikan bangunan yang terbakar sebagai titik fokus yang digunakan untuk menilai seluruh peristiwa. Namun, secara semiotis, ikon yang sama dapat memiliki banyak makna. Bagi sebagian audiens, bangunan yang terbakar mungkin menandakan kriminalitas dan kekacauan; bagi yang lain, mungkin menandakan kedalaman frustrasi politik dan runtuhnya kepercayaan. Pembingkai dominan media cenderung menstabilkan makna pertama dengan menanamkan

ikon tersebut dalam narasi ancaman dan kebutuhan negara.



Gambar 5. Gedung DPRD Setelah Demonstrasi

Sumber: Kompas.com, 31 Agustus 2025.

Gambar tersebut menunjukkan sebuah bangunan yang terbakar di bawah pengawasan keamanan, menandakan upaya negara untuk menegaskan kembali legitimasi melalui kontrol visual atas ruang publik.

Gambar 5 melengkapi alur simbolis yang dibentuk oleh ikon kebakaran. Bangunan tampak rusak, namun adegan tersebut diatur di sekitar penjagaan polisi dan kontrol spasial. Komposisi ini menggambarkan kembalinya ketertiban, menunjukkan bahwa negara telah mendapatkan kembali otoritas atas ruang yang sebelumnya dilanggar. Oleh karena itu, gambar tersebut berkontribusi pada penutupan moral: tindakan menyimpang tersebut terkendali, dan

legitimasi ditegaskan kembali melalui kontrol yang terlihat. Dalam ekonomi naratif liputan, penjagaan pasca kejadian tidak hanya mendokumentasikan akibatnya; ia melakukan pemulihan kedaulatan secara simbolis.

3.7. Mediatisasi, Viralitas, dan Normalisasi Kekerasan

Liputan Kompas juga mencerminkan kesadaran akan peredaran visual protes secara digital, seringkali merujuk pada video viral dan unggahan media sosial yang membentuk perhatian publik. Hal ini menunjukkan keterkaitan antara jurnalisme arus utama dan logika mediatisasi yang lebih luas, di mana visibilitas dihasilkan melalui dinamika *Platform*, berbagi secara real-time, dan kekuatan afektif gambar. Dalam lingkungan protes kontemporer, visual tidak tetap berada dalam batas satu media; visual tersebut beredar di berbagai jaringan, diberi keterangan ulang, dan memasuki beragam komunitas interpretatif. Studi tentang komunikasi protes digital menunjukkan bahwa keterlibatan online dan metrik perhatian dapat berfungsi sebagai indikator potensi mobilisasi, menunjukkan bahwa visibilitas itu sendiri dapat menjadi

sumber daya dalam aksi kolektif (Neumayer et al., 2023). Penyebaran visual viral juga dapat mengintensifkan keterlibatan warga dengan memicu sentimen publik sebagai respons terhadap ketidakadilan yang dirasakan.

Namun, narasi Kompas cenderung memobilisasi viralitas terutama sebagai alat dramatisasi daripada sebagai objek kritik. Visual viral digunakan untuk memperkuat intensitas peristiwa, berkontribusi pada tontonan konflik yang menarik perhatian pada kehancuran dan konfrontasi. Dengan demikian, liputan tersebut berisiko ikut serta dalam apa yang dapat dipahami sebagai normalisasi kekerasan simbolik: gambar-gambar destruktif menjadi konten rutin, diulang dan distabilkan sebagai representasi utama protes. Dinamika ini konsisten dengan argumen bahwa lingkungan media hibrida dapat memperkuat kerangka konfrontasi dan membentuk bagaimana audiens merekonstruksi narasi perjuangan dan ketertiban (García-Perdomo et al., 2023; Harlow & Brown, 2021).

Implikasi sosiologisnya adalah bahwa mediatisasi dapat menjadi arena sekunder eskalasi. Kamera dan

audiens imajiner dapat memengaruhi bagaimana tindakan dilakukan dan bagaimana emosi beredar, sementara paparan berulang terhadap ikon kekerasan secara bertahap dapat membuat publik menjadi kurang peka atau menormalkan hubungan antara protes dan kekacauan. Ketika media arus utama mereproduksi konten viral tanpa kontekstualisasi yang berkelanjutan, mereka mungkin secara tidak sengaja memperkuat pelajaran moral bahwa protes sama dengan ancaman, sehingga mempersempit simpati demokratis terhadap tindakan kolektif.

3.8. Sintesis Analitik: Media, Visualitas, dan Norma Kolektif

Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa Kompas memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman publik tentang perilaku kolektif spontan dengan membangun narasi moral dan afektif melalui penekanan visual selektif dan bahasa normatif. Media tidak hanya merepresentasikan protes; media juga berpartisipasi dalam menghasilkan kategori ketertiban dan kekacauan, legitimasi dan kriminalitas, melalui citra pengait yang berulang dan suara yang terhierarki. Protes tersebut dibingkai

sebagai pergeseran linier menuju kekacauan, dan spontanitas diinterpretasikan sebagai kurangnya kendali daripada sebagai proses interaksional yang dinamis.

Visual dan narasi Kompas secara kolektif menyusun alur cerita yang meningkat, bergerak dari ketegangan laten menuju penularan emosional, dari kehancuran simbolis menuju dominasi negara, dan dari kekacauan menuju kekuasaan yang dinormalisasi. Visual fase awal menyoroti konfrontasi dan solidaritas, membentuk ekspektasi bahwa peningkatan ketegangan adalah hal yang mungkin terjadi. Visual fase peningkatan ketegangan memusatkan perhatian pada api dan konfrontasi, mengkonsolidasikan kriminalitas melalui simbol ancaman dan saling menyalahkan secara kolektif. Visual pasca peningkatan ketegangan menonjolkan penjagaan polisi dan kontrol spasial, menghasilkan penutupan moral dan memulihkan legitimasi negara melalui pendudukan visual di lokasi yang rusak. Hal tersebut, media memperkuat ketakutan dan urgensi publik sambil kurang mengeksplorasi ketidakadilan yang dirasakan para demonstran dan emosi politik mereka,

sehingga menghasilkan ketidakseimbangan afektif yang mendelegitimasi protes dari dalam.

Sintesis ini menggarisbawahi klaim empiris utama dari penelitian ini: perilaku kolektif spontan secara bersamaan merupakan fenomena lapangan dan konstruksi diskursif. Perilaku ini diwujudkan melalui interaksi, emosi, dan isyarat situasional yang berubah-ubah, tetapi juga distabilkan dan dimoralisasi melalui rezim visual dan linguistik narasi media. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana protes politik berlangsung tidak hanya di ruang fisik tetapi juga di ruang yang dimediasi di mana citra, label, dan suara resmi membentuk apa yang diakui publik sebagai "*post truth*" dari suatu peristiwa yang kontroversial. Sehingga dalam demokrasi Indonesia, penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola protes tidak dapat dipisahkan dari tata kelola visibilitas, dan bahwa pemahaman tentang eskalasi membutuhkan perhatian pada bagaimana visual dan narasi media menghasilkan batasan normatif dari tindakan kolektif.

4. Diskusi

4.1. Visualitas sebagai Praktik Sosial dan Bukti Primer

Hasil penelitian ini menyoroti klaim metodologis dan teoretis utama yaitu materi visual dalam liputan Kompas berfungsi sebagai praktik sosial yang secara aktif berpartisipasi dalam produksi makna protes, alih-alih berfungsi sebagai ilustrasi netral dari realitas yang sudah terbentuk. Posisi ini sejalan dengan penegasan sosiologi visual bahwa gambar tertanam dalam hubungan sosial dan rutinitas kelembagaan; gambar dibuat, diedarkan, dan dikonsumsi dalam rezim visibilitas tertentu yang sekaligus mengungkapkan dan menyembunyikan. Kasus Makassar menunjukkan bahwa gambar dan video berita tidak hanya "menunjukkan apa yang terjadi" tetapi juga mengatur bagaimana publik belajar mengenali peristiwa tersebut, siapa yang dianggap sebagai aktor yang sah, dan jenis respons apa yang dianggap wajar. Ketika pemilihan dan pengulangan gambar tertentu menjadi stabil, visual tersebut memperoleh kekuatan epistemik: visual tersebut berfungsi sebagai bukti dalam imajinasi publik bahkan ketika

mekanisme interaksional yang mendasarinya tetap tidak dijelaskan.

Oleh karena itu, memperlakukan visual sebagai data primer bukanlah preferensi teknis melainkan sikap epistemologis. Dibandingkan dengan deskripsi tekstual murni, gambar dan video dapat menangkap dimensi afektif, relasional, dan simbolik secara bersamaan: kedekatan fisik, kepadatan kerumunan, koreografi gerakan, ekspresi wajah, dan gestur mikro yang membuat ketegangan menjadi nyata. Keunggulan epistemik ini telah ditekankan dalam penelitian visual kualitatif, di mana materi visual didekati sebagai sumber pengetahuan sosial yang otonom daripada dokumentasi tambahan (Bayramoğlu, 2022). Fase awal dalam korpus Makassar, (Gambar 1 dan 2) memberikan akses ke pengaturan pra-eskalasi tubuh dan otoritas, termasuk bagaimana kerumunan mengarahkan diri ke arah simbol negara dan bagaimana kehadiran polisi membentuk cakrawala interaksi. Konfigurasi seperti itu sulit direkonstruksi hanya melalui teks tanpa kehilangan isyarat yang terwujud dan spasial yang mengkondisikan perilaku kolektif.

Pada saat yang sama, hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan epistemik visual tidak dapat dipisahkan dari politik produksi. Sudut kamera, jarak pengambilan gambar, dan fokus komposisi pada api dan kehancuran tidak hanya mendokumentasikan; tetapi juga menjalankan fungsi pembentukan makna yang menjadi landasan cerita. Ketika Kompas berulang kali mengutamakan bangunan yang terbakar sebagai ikon penentu peristiwa (Gambar 3), visual tersebut menjadi pusat interpretasi yang menata ulang kausalitas dan mengurangi kompleksitas norma yang muncul menjadi narasi kekacauan yang mudah dipahami. Dalam hal ini, visualitas Kompas tidak berada di luar peristiwa protes; visualitas tersebut merupakan bagian dari ekologi yang lebih luas di mana protes menjadi dapat dipahami secara publik dalam lingkungan yang dimediasi (Adam-Troian et al., 2021).

4.2. Eskalasi Spontan dan Perilaku Kolektif Kontemporer

Kontribusi utama dari temuan ini adalah untuk menantang asumsi-asumsi yang sering diwarisi dari teori-teori kerumunan klasik yang memperlakukan kekerasan kolektif

sebagai gejala irasionalitas atau hilangnya jati diri secara impulsif. Urutan visual, khususnya seperti yang dirangkum dalam Tabel 1, menunjukkan bahwa eskalasi berlangsung secara terstruktur dan dapat dipahami secara temporal. Fase pra-eskalasi ditandai oleh ketegangan laten dan pengekan diri kolektif ; tubuh-tubuh diorientasikan, jarak dinegosiasikan, dan identitas kerumunan ditampilkan melalui sinkronisasi dan slogan-slogan bersama. Fase eskalasi bukanlah keretakan acak tetapi pergeseran dalam bidang interaksi: api menjadi titik fokus yang mengarahkan kembali perhatian, menekan diferensiasi, dan mengubah visibilitas internal kerumunan. Sementara itu, fase pasca-eskalasi dipentaskan sebagai penutupan melalui pendudukan kembali ruang oleh negara (Gambar 5).

Eskalasi berpola semacam itu mendukung interpretasi yang lebih kontemporer tentang perilaku kolektif sebagai perilaku yang rasional secara situasional bahkan ketika secara normatif dikutuk. Kajian protes kontemporer semakin mengkonseptualisasikan demonstrasi sebagai perilaku kolektif yang muncul

dan dibentuk oleh interaksi horizontal, dinamika emosional, dan kognisi terdistribusi daripada komando terpusat (Kudesia, 2021; Wright dkk., 2022; Wagoner dkk., 2023). Dalam pandangan ini, spontanitas bukanlah ketiadaan makna tetapi mode adaptasi kolektif yang cepat terhadap perubahan konfigurasi ancaman, peluang, dan fokus simbolik. Kasus Makassar menggambarkan bagaimana visibilitas bersama apa yang dilihat peserta secara bersama-sama dan apa yang mereka kenali sebagai situasi kolektif. Dapat berfungsi sebagai dasar praktis untuk bertindak. Ketika massa merasakan perubahan intensitas penegakan hukum, akses spasial terhadap simbol-simbol negara, atau momentum yang diciptakan oleh sinkronisasi kolektif, norma-norma yang muncul dapat terbentuk dan menghilang dengan cepat. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menggemakan argumen yang lebih luas bahwa lintasan protes tidak dapat dipahami tanpa memperhatikan mikropolitik dari isyarat interaksional dan urutan temporal peristiwa.

Narasi Kompas cenderung memadatkan dinamika ini menjadi pergeseran linier dari protes menuju

kekacauan, namun catatan visual menunjukkan proses yang lebih berlapis. Perbedaan ini memiliki konsekuensi analitis. Ketika eskalasi dinarasikan sebagai sesuatu yang tiba-tiba dan melekat pada "massa," hal itu mendorong interpretasi publik yang memperlakukan pertemuan sebagai sesuatu yang secara intrinsik berisiko daripada bergantung pada situasi. Sebaliknya, pembacaan analitis visual menunjukkan bahwa eskalasi muncul melalui titik-titik pemicu yang dapat diidentifikasi dan pergeseran bertahap, yang konsisten dengan penjelasan psikologi sosial kontemporer yang memperlakukan tindakan kolektif sebagai sesuatu yang dibentuk oleh identitas, persepsi ketidakadilan, dan penilaian efikasi. Oleh karena itu, temuan ini memperluas kerangka penjelasan eskalasi harus dipahami sebagai pencapaian interaksional, bukan sekadar patologi massa.

4.3. Kriminologi Visual dan Produksi Narasi "Anarkis"

Dari perspektif kriminologi visual, kasus Makassar menggambarkan bagaimana pembingkai media berperan dalam menghasilkan kategori kriminalitas dalam konteks protes. Penekanan Kompas pada

simbol ancaman api, asap, arsitektur yang rusak berfungsi sebagai jalan pintas visual untuk penyimpangan, membangun kesan bahwa protes tersebut telah melampaui batas moral yang tersirat. Proses ini selaras dengan premis inti kriminologi visual bahwa kejahatan dan gangguan ketertiban tidak hanya dilaporkan tetapi juga divisualisasikan melalui strategi representasional yang menciptakan klasifikasi sosial dan melegitimasi respons tertentu (Harlow & Brown, 2021). Liputan Kompas, dalam pemusatan berulang pada citra kebakaran menstabilkan narasi ancaman yang membingkai tindakan kolektif sebagai masalah keamanan.

Temuan ini juga menunjukkan bagaimana kriminalisasi diperparah oleh pengaburan pelaku individu. Penggunaan deskripsi umum dan visibilitas terbatas dari aktor spesifik menciptakan efek menyalahkan kolektif, di mana "kerumunan" menjadi subjek kriminalitas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa citra media selama protes yang meningkat sering menekankan tanggung jawab kolektif daripada kekhususan individu, sehingga meratakan heterogenitas dan mengaburkan peran peserta yang

beragam (James, 2024). Konsekuensi moralnya adalah protes menjadi dapat dibaca sebagai tindakan menyimpang yang monolitik daripada sebagai bidang sosial yang terdiferensiasi yang mengandung berbagai niat, tingkat partisipasi, dan derajat keterlibatan.

Kriminologi visual juga mengundang pembaca ganda. Sementara pembingkai media dominan mengkonstruksi pembakaran sebagai tindakan kriminal yang berlebihan, visual yang sama dapat membawa makna kontra-hegemoni ketika diinterpretasikan melalui kerangka kerja alternatif. Pembakaran gedung legislatif dapat dibaca sebagai perlawanan simbolis tanda dramatis delegitimasi yang diarahkan pada lembaga yang dianggap tidak responsif. Ambivalensi semacam itu melekat dalam ikonografi politik: gambar yang sama dapat diedarkan sebagai bukti kekacauan atau sebagai bukti keputusan politik. Kasus Makassar menggarisbawahi bahwa narasi visual tidak secara inheren tetap; narasi tersebut menjadi stabil melalui pembingkai, keterangan, dan suara otoritatif yang berulang. Ini menunjukkan bahwa politik

interpretasi protes tidak hanya bergantung pada apa yang ditampilkan tetapi juga pada bagaimana otoritas interpretatif didistribusikan di seluruh media, aktor negara, dan publik.

Normalisasi respons negara merupakan bagian dari struktur representasional ini. Seiring berjalannya narasi, visualisasi penegakan hukum, pembubaran, dan penjagaan lokasi yang terbakar dibingkai sebagai restorasi dan kebutuhan, memposisikan kekuatan negara sebagai rasional dan sah. Kecenderungan ini konsisten dengan temuan bahwa visualisasi protes dapat menormalisasi interpretasi punitif dan memperkuat dukungan untuk penegakan hukum yang agresif ketika kerusakan menjadi fokus utama (Metcalfe & Pickett, 2021). Rezim visual Kompas berkontribusi pada tatanan moral yang menempatkan negara di sisi stabilitas dan massa di sisi penyimpangan, sehingga mempersempit imajinasi demokratis tentang protes sebagai mode pengajuan tuntutan yang sah.

4.4. Pengaruh Kolektif dan SIMCA dalam Bentuk Visual

Tekstur afektif yang terlihat dalam korpus Kompas memperkuat

relevansi SIMCA untuk menafsirkan eskalasi protes. SIMCA menekankan bahwa tindakan kolektif dimotivasi oleh identifikasi kelompok, ketidakadilan yang dirasakan, dan keyakinan akan efikasi kolektif (Shadiqi & Mangkurat, 2021). Gambar-gambar fase awal, terutama yang menangkap gerakan sinkron dan nyanyian kolektif (Gambar 2), memberikan bukti visual tentang keselarasan identitas dan resonansi afektif. Kemarahan dan solidaritas bukan hanya perasaan individu; keduanya menjadi kolektif melalui ritme bersama, visibilitas bersama, dan koordinasi yang diwujudkan. Hal ini konsisten dengan klaim bahwa protes dipertahankan tidak hanya oleh kesepakatan kognitif tetapi juga oleh ikatan afektif yang membuat partisipasi menjadi bermakna.

Temuan ini juga menggambarkan bagaimana emosi beredar secara visual dan membentuk interpretasi kolektif. Citra protes yang menonjolkan konfrontasi dan ketakutan dapat menghasilkan penularan emosi di antara audiens maupun di antara para peserta. Kajian visual telah mencatat bahwa gambar dapat membangkitkan rasa takut, urgensi, atau empati, sehingga

membentuk bagaimana publik mengevaluasi legitimasi dan kekacauan (Chang et al., 2022). Bahasa afektif Kompas dan pemilihan visual yang berpusat pada kekacauan memperkuat ketakutan publik sekaligus meminggirkan pengalaman ketidakadilan para demonstran. Hal ini menunjukkan asimetri afektif, publik diajak untuk merasa terancam, sementara kemarahan para pengunjung rasa dibingkai sebagai agresi irasional daripada sebagai frustrasi yang dapat dipahami secara politis.

Asimetri seperti itu penting untuk interpretasi demokratis. Ketika kemarahan terlepas dari ketidakadilan yang dirasakan, dasar moral protes menjadi kabur, dan tindakan kolektif tampak sebagai kekerasan yang tidak beralasan. Namun, catatan visual menunjukkan bahwa kemarahan diperkuat melalui isyarat situasional dan sinkronisasi kolektif. SIMCA adalah efektivitas tindakan kolektif yang dirasakan dapat terwujud ketika peserta menyaksikan momentum mereka sendiri melalui kepadatan kerumunan, sinkronisasi nyanyian, dan kedekatan simbolis dengan lembaga negara. Ketika api menjadi ikon utama, itu tidak hanya menandai

kehancuran; itu menandakan momen di mana kemarahan kolektif dibuat terlihat secara spektakuler. Pembakaran tersebut menjadi artikulasi visual dari ketidakadilan bersama, bahkan ketika secara bersamaan dibingkai sebagai penyimpangan.

Ketegangan interpretatif ini menunjukkan implikasi analitis yang penting: data visual memungkinkan para peneliti untuk memeriksa bagaimana jangkar motivasi dari tindakan kolektif diwujudkan, bukan hanya dinyatakan. Identitas terlihat dalam sinkronisasi; ketidakadilan terlihat dalam target dan simbol yang dipilih; efikasi terlihat dalam kemampuan massa untuk menduduki ruang dan menarik perhatian. Oleh karena itu, kasus Makassar menunjukkan bahwa SIMCA dapat diperkuat dengan mengintegrasikan analisis visual sebagai sarana untuk menelusuri bagaimana mekanisme psikologis diwujudkan dalam lingkungan spasial dan simbolik protes.

4.5. Kekerasan yang Dimediasi dan Transformasi Aksi Kolektif

Temuan ini juga menggarisbawahi bahwa demonstrasi kontemporer tidak dapat dipisahkan

dari logika media. Kekerasan dalam protes bukan hanya praktik fisik tetapi juga praktik yang dimediasi, diproduksi, direkam, dan disebarluaskan untuk khalayak yang lebih luas. Liputan Kompas mencerminkan lingkungan media hibrida di mana jurnalisme arus utama berinteraksi dengan video viral dan unggahan media sosial, menggunakannya sebagai sumber untuk dramatisasi dan penguatan narasi. Hal ini konsisten dengan penelitian yang menunjukkan bahwa penyebaran visual secara real-time dapat memperluas visibilitas dan membentuk kembali bagaimana protes dipahami dan dilibatkan di luar wilayah terdekat (Adam-Troian et al., 2021). Kekerasan yang dimediasi sangat relevan karena kehadiran kamera dapat mengubah perilaku. Studi analitik visual menunjukkan bahwa kamera dan siaran langsung dapat mengintensifkan performativitas dan mempercepat difusi emosi dalam kerumunan (Chang et al., 2022). Kasus di Makassar, keunggulan visual dari tindakan ekstrem di ruang-ruang yang sangat terbuka menunjukkan kesadaran akan audiens yang dibayangkan, baik media arus utama maupun publik digital. Kekerasan

menjadi performatif bukan hanya untuk keuntungan politik langsung tetapi juga untuk dampak simbolis melalui sirkulasi. Dinamika ini menandai transformasi tindakan kolektif: protes ditujukan kepada negara, tetapi juga kepada publik yang berfungsi sebagai hakim legitimasi.

Pada saat yang sama, mediatisasi dapat berkontribusi pada normalisasi kekerasan ketika citra destruktif berulang kali direproduksi tanpa kontekstualisasi yang berkelanjutan. Seperti yang ditunjukkan Tabel 1, kebakaran dan arsitektur yang rusak menjadi isyarat memori yang menentukan peristiwa tersebut, sementara kerja interaksional transisi dari eskalasi tetap kurang terlihat. Dalam rezim seperti itu, ikon kekerasan dapat menjadi perangkat naratif rutin, secara bertahap mempererat hubungan antara protes dan kekacauan. Kecenderungan ini diperkuat ketika pembingkai media memperlakukan viralitas terutama sebagai tontonan daripada sebagai mekanisme yang membentuk partisipasi dan interpretasi. Penelitian tentang keterlibatan digital menunjukkan bahwa dinamika perhatian dapat

dikaitkan dengan potensi mobilisasi (Neumayer et al., 2023). Bahwa konten viral dapat memicu sentimen dan partisipasi massa sebagai respons terhadap ketidakadilan yang dirasakan (Singleton et al., 2024). Hal tersebut menunjukkan peredaran ikon kekerasan bukan hanya sebuah hasil tapi dapat menjadi faktor yang mengkonfigurasi ulang harapan dan perilaku dalam protes di masa mendatang.

4.6. Implikasi Teoretis dan Sosial

Secara teoritis, studi ini memperluas penelitian perilaku kolektif dengan memposisikan visualitas sebagai variabel konstitutif dalam eskalasi protes. Integrasi sosiologi visual, kriminologi visual, dan SIMCA menunjukkan bahwa eskalasi tidak dapat dijelaskan secara memadai tanpa memperhatikan bagaimana visibilitas membentuk interaksi dan bagaimana pembingkai media membentuk kategorisasi moral. Sosiologi visual menjelaskan bahwa gambar secara aktif menghasilkan makna sosial; kriminologi visual menjelaskan bagaimana makna-makna tersebut dapat diorganisasikan ke dalam narasi penyimpangan dan rezim legitimasi; dan SIMCA menjelaskan bagaimana

identitas, ketidakadilan, dan efikasi diwujudkan dalam konteks kolektif. Kasus Makassar menunjukkan bahwa perspektif-perspektif ini saling memperkuat ketika analisis mempertimbangkan secara serius bahwa protes berlangsung di dua arena yang saling terkait: arena fisik interaksi jalanan dan arena media sirkulasi visual.

Secara sosial, temuan ini memiliki implikasi bagi pemahaman publik dan tata kelola demonstrasi. Ketika kerangka visual dominan menyederhanakan kompleksitas protes dan memperkuat stigma kriminal, hal itu mempersempit ruang bagi empati demokratis dan memperluas legitimasi respons represif. Ini tidak berarti bahwa tindakan destruktif harus dibenarkan; melainkan, hal ini menunjukkan bahwa interpretasi publik dan respons kebijakan harus didasarkan pada pemahaman tentang eskalasi sebagai proses situasional daripada sebagai patologi massa yang inheren. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan konflik di era digital tidak hanya melibatkan pengendalian ruang fisik tetapi juga negosiasi makna visual. Negara, media, dan masyarakat sipil berpartisipasi dalam

perjuangan simbolis tentang apa "itu" protes, dan perjuangan ini dilakukan melalui gambar sama seperti melalui hukum atau pidato.

Kasus yang terjadi di Makassar memberikan wawasan yang perlu diwaspadai: tatanan moral protes semakin diatur oleh politik visibilitas. Ketika api menjadi ikon dominan dan suara-suara alternatif diminimalkan, signifikansi demokratis protes berisiko dikalahkan oleh narasi keamanan. Sebaliknya, ketika analisis visual diintegrasikan ke dalam penelitian dan debat publik, dinamika transisi eskalasi menjadi lebih mudah dipahami, membuka kemungkinan untuk strategi tata kelola protes yang lebih berbasis bukti dan manusiawi yang mengakui legitimasi keluhan dan kebutuhan untuk mencegah eskalasi yang destruktif.

D. Kesimpulan

Penelitian menunjukkan bahwa perilaku kolektif spontan dalam protes pembakaran DPRD Makassar 2025 tidak hanya diwujudkan melalui pergeseran interaksi di lapangan, tetapi juga distabilkan dan dimoralisasi melalui visualitas media. Liputan Kompas membangun alur cerita linier di mana protes politik

tampak bergeser "secara alami" ke dalam kekacauan, menonjolkan citra api, asap, dan kerusakan arsitektur sambil meremehkan transformasi bertahap dari norma-norma yang muncul. Temuan menunjukkan bahwa rezim visual ini menghasilkan efek menyalahkan kolektif yang kuat dengan mengaburkan agensi individu, mempersempit perhatian interpretatif pada simbol ancaman, dan mengangkat suara resmi sebagai sumber legitimasi utama. Akibatnya, dinamika protes spontan berulang kali diterjemahkan ke dalam narasi kekacauan yang disekuritisasi, sementara klaim afektif para pengunjung rasa kemarahan, frustrasi, dan ketidakadilan yang dirasakan dianggap sebagai irasionalitas daripada emosi yang dapat dipahami secara politis.

Implikasinya ada dua. Secara teoritis, studi ini memperkuat penelitian perilaku kolektif dengan memposisikan visualitas sebagai variabel konstitutif dalam eskalasi, mengintegrasikan sosiologi visual, kriminologi visual, dan Model Identitas Sosial Aksi Kolektif untuk menunjukkan bagaimana identitas, ketidakadilan, dan efikasi ditampilkan dan diinterpretasikan melalui gambar.

Secara sosial, temuan ini memperingatkan bahwa tata kelola protes di era digital tidak dapat dipisahkan dari tata kelola visibilitas: apa yang ditampilkan, diulang, dan disahkan dalam narasi media membentuk dukungan publik terhadap respons hukuman. Penelitian selanjutnya dapat memperluas pendekatan ini melalui perbandingan lintas media, analisis sirkulasi berbasis *Platform*, dan etnografi visual yang berpusat pada partisipan untuk mengklarifikasi bagaimana kerangka visual alternatif memungkinkan pembacaan moral yang berbeda terhadap politik yang kontroversial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan kita akal dan pikiran, kesehatan dan semangat hingga tugas artikel ini dapat diselesaikan tepat waktu. Terima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan dan menjalankan ini. Terima kasih kepada bapak pembimbing yang sering menghilang dengan sebutan Kakanda Hadisaputra yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan tugas ini. Terakhir

terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam tugas kami.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam-Troian, J., Bonetto, É., & Arciszewski, T. (2021). We Shall Overcome: First-Person Plural Pronouns From Search Volume Data Predict Protest Mobilization Across the United States. *Social Psychological and Personality Science*, 12(8), 1476–1485. <https://doi.org/10.1177/1948550620987672>
- Bahrudin, H., & Bakar, K. A. (2022). Dissent by Design: A Multimodal Study of 2019 Women's March MY Protest Signs. *Theory and Practice in Language Studies*, 12(6), 1076–1086. <https://doi.org/10.17507/tpsls.1206.07>
- Bayramoğlu, Y. (2022). Border Countervisuality: Smartphone Videos of Border Crossing and Migration. *Media Culture & Society*, 45(3), 595–611. <https://doi.org/10.1177/01634437221136013>
- Beukes, J., & Beukes, L. E. (2023). Proposing a Social Justice

- Approach to Diaconia for a South African Context. *Religions*, 14(5), 668.
<https://doi.org/10.3390/rel14050668>
- Brown, M., & Carrabine, E. (2020). *Routledge International Handbook of Visual Criminology*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315727317>
- Chang, H.-C. H., Richardson, A. V., & Ferrara, E. (2022). #JusticeforGeorgeFloyd: How Instagram Facilitated the 2020 Black Lives Matter Protests. *PLOS ONE*, 17(12), e0277864.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0277864>
- Chen, S., Jiao, L., & Zhou, Z. (2022). Visual Analytics for Social Behavior Analysis: A Survey. *IEEE Computer Graphics and Applications*, 42(1), 32–45.
<https://doi.org/10.1109/MCG.2021.3129954>
- Cowart, H. S., Blackstone, G. E., & Riley, J. K. (2022). Framing a Movement: Media Portrayals of the George Floyd Protests on Twitter. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 99(3), 676–695.
<https://doi.org/10.1177/10776990221109232>
- Dighe, S. (2023). Moving Beyond Methods Training: Key Directions for Decolonizing Evaluation Education in the Global South. *New Directions for Evaluation*, 2023(177), 85–93.
<https://doi.org/10.1002/ev.20538>
- Drury, J., Stott, C., Ball, R., Reicher, S., Neville, F., Bell, L., & Ryan, C. (2020). A Social Identity Model of Riot Diffusion: From Injustice to Empowerment in the 2011 London Riots. *European Journal of Social Psychology*, 50(3), 646–661.
- Elareshi, M., Ziani, A., Alsridi, H., & Tahat, K. (2025). News Photographs Depicting the 2022 Russia–Ukraine Conflict Across Arab and Non-Arab News Outlets. *International Journal of Conflict Management*.
<https://doi.org/10.1108/ijcma-04-2025-0114>
- García-Perdomo, V., Magaña, M. I., Hernández-Rodríguez, J. C., & Sánchez, J. A. V. (2023).

- | | |
|--|---|
| <p>Engaging Social Media Audiences With Riots: TV and Newspapers' Coverage of the 2019 Protests in Colombia and Chile. <i>International Communication Gazette</i>, 86(8), 607–632.
 https://doi.org/10.1177/17480485231206363</p> <p>Harlow, S., & Brown, D. K. (2021). Protest News and Facebook Engagement: How the Hierarchy of Social Struggle Is Rebuilt on Social Media. <i>Journalism & Mass Communication Quarterly</i>, 98(3), 665–691.
 https://doi.org/10.1177/10776990211017243</p> <p>Harlow, S., & Brown, D. K. (2023). A New Protest Paradigm: Toward a Critical Approach to Protest News Analyses. <i>The International Journal of Press/Politics</i>, 28(2), 333–343.
 https://doi.org/10.1177/19401612231153377</p> <p>Hoffmann, M., & Neumayer, C. (2024). Images of Protest in Movement Parties' Social Media Communication. <i>New Media & Society</i>, 27(8), 4929–4952.</p> | <p>https://doi.org/10.1177/14614448241243352</p> <p>James, B. (2024). Violent Incongruencies: Analyzing The New York Times's Discourse on George Floyd Demonstrations and the Capitol Riot. <i>Discourse & Communication</i>, 18(3), 396–414.
 https://doi.org/10.1177/17504813231225443</p> <p>Jiang, T., & Chen, Z. (2020). Relative Deprivation: A Mechanism for the Ostracism--Aggression Link. <i>European Journal of Social Psychology</i>, 50(2), 347–359.</p> <p>Kudesia, R. S. (2021). Emergent Strategy From Spontaneous Anger: Crowd Dynamics in the First 48 Hours of the Ferguson Shooting. <i>Organization Science</i>, 32(5), 1210–1234.
 https://doi.org/10.1287/orsc.2020.1426</p> <p>Metcalfe, C., & Pickett, J. T. (2021). Public Fear of Protesters and Support for Protest Policing: An Experimental Test of Two Theoretical Models. <i>Criminology</i>, 60(1), 60–89.
 https://doi.org/10.1111/1745-9125.12291</p> |
|--|---|

- Neumayer, E., Pfaff, K., & Plümper, T. (2023). Protest Against Covid-19 Containment Policies in European Countries. *Journal of Peace Research*, 61(3), 398–412. <https://doi.org/10.1177/00223433221135335>
- Ng, S. H., & Platow, M. J. (2024). The Violent Turn in Non-violent Collective Action: What Happens? *Asian Journal of Social Psychology*, 27(3), 303–317. <https://doi.org/10.1111/ajsp.12596>
- Nussio, E. (2023). How Moral Beliefs Influence Collective Violence. Evidence From Lynching in Mexico. *Comparative Political Studies*, 58(1), 43–77. <https://doi.org/10.1177/00104140231223747>
- Pamungkas, Y. B., Yuwanto, Y., Adnan, M., Hasfi, N., & Hapsari, R. (2025). The Power of Virality: Source Credibility, Moral Emotions, and Social Engagement Driving Public Mobilization in ‘Peringatan Darurat’ Videos. *Journal of Intercultural Communication*, 25–35. <https://doi.org/10.36923/jicc.v25i3.1115>
- Pink, S. (2021). *Doing Visual Ethnography*. SAGE Publications.
- Porter, G. (2025). Out of the Shadows: A Photo-Essay of Antipodean Colonisation, Resistance and Massacres. *Crime Media Culture*, 22(1), 206–221. <https://doi.org/10.1177/17416590241312156>
- Proust, V., & Saldaña, M. (2022). Another Violent Protest? New Perspectives to Understand Protest Coverage. *Media and Communication*, 10(4). <https://doi.org/10.17645/mac.v10i4.5796>
- Shadiqi, M. A., & Mangkurat, U. L. (2021). *Ac ce pt Bo ok Ch ap ter*. January, 1–32.
- Silva, T., & Santos, G. F. d. (2024). Alternative Criminology: Cultural Criminology. *International Journal of Professional Business Review*, 9(11), e05104. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2024.v9i11.5104>
- Singleton, W. T., Lowrey, W., &

- Buzzelli, N. (2024). Must I Follow the Script? Professional Objectivity, Journalistic Roles and the Black Community Journalist. *Newspaper Research Journal*, 45(2), 157–174. <https://doi.org/10.1177/07395329231221521>
- Storbeck, M., Jacobs, G., Schuilenburg, M. B., & Akker, R. v. d. (2025). Surveillance Experiences of Extinction Rebellion Activists and Police: Unpacking the Technologization of Dutch Protest Policing. *Big Data & Society*, 12(1). <https://doi.org/10.1177/20539517241307892>
- Wagoner, B., Awad, S. H., & Power, S. A. (2023). Protest Crowds Through the Lens of Distributed Cognition. *Social Research*, 90(2), 293–314. <https://doi.org/10.1353/sor.2023.a901706>
- Wikström, P. H., & Kroneberg, C. (2022). Analytic Criminology: Mechanisms and Methods in the Explanation of Crime and Its Causes. *Annual Review of Criminology*, 5(1), 179–203. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-030920-091320>
- Wright, J. E., Gaozhao, D., Dukes, K., & Templeton, D. (2022). The Power of Protest on Policing: Black Lives Matter Protest and Civilian Evaluation of the Police. *Public Administration Review*, 83(1), 130–143. <https://doi.org/10.1111/puar.13498>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. SAGE Publications.
- Zafar, A. B., & Blackmer, G. C. (2025). Digital Religion in the Public Sphere: Tehreek-E-Labbaik Pakistan (TLP) and Alternative for Germany (AfD). *Religions*, 16(5), 627. <https://doi.org/10.3390/rel16050627>
- Zulli, D., Coe, K., & Isaacs, Z. (2022). News Framing in the Aftermath of the January 6 Attacks on the U.S. Capitol: An Analysis of Labels, Definitional Uncertainty, and Contextualization. *American Behavioral Scientist*, 67(6), 702–720.

<https://doi.org/10.1177/00027642>

221096333